

ANALISIS LQ, dan PROYEKSI KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA KE KALIMANTAN

Yahya Bugis
Yahya.albiruni@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine the influence LQ Analyzed effect of Public Policy KN. Kalimantan Timur Province. This research uses the anized Location Quation (LQ) to search growth economic in Kalimantan Timur Province. Used data 2017 until 2021*

Keywords: *LQ, Policyt, Kalimantan Timur Province*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh LQ. Analisis pengaruh Kebijakan Publik KN. Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode Location Quation (LQ) yang dianalisis untuk mencari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Data yang digunakan tahun 2017 hingga tahun 2021

Kata Kunci : *LQ, Kebijakan, Provinsi Kalimantan Timur*

INTRODUCTION

Melalui Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019 pemerintah mengumumkan perpindahan ibu kota negara (IKN) ke Propinsi Kalimantan Timur. Perpindahan ibu kota negara merupakan tujuan awal pemerintah untuk pemeratakan pendapatan ekonomi dan mempercepat pembangunan daerah yang bukan hanya bertumpu di wilayah Indonesia bagian barat saja namun dengan adanya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur diharapkan mampu membawa perubahan dalam segala hal baik itu ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Ketetapan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan mengundang banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat, meskipun begitu banyak negara di dunia yang telah berhasil memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai macam pertimbangan. Begitupun dengan Indonesia yang tentunya harus belajar dari negara- negara yang berhasil dalam memindahkan ibu kotanya.

Salah satu alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk yang menjadi masalah klasik di Jakarta sebagai ibu kota negara, tercatat kepadatan penduduk di Jakarta (Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau jawa namun di lain pihak sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan pada tahun 2010, dan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010 sampai tahun 2020 sebesar 1,25 %, dimana penduduk dengan usia produktif di angka 70,72 % 2 yang berarti Indonesia masih dalam masa bonus demografi, sehingga potensi pemerintah untuk memaksimalkan laju Angkatan kerja dengan usia produktif tersebut sebagai salah satu bagian yang menopang kesejahteraan negara di masa depan dengan kebijakan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan namun kecenderungan pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi usia produktif Indonesia. (Pribadi & Utomo, 2021)

Tentu saja, pertimbangan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara tersebut di ikuti dengan indikasi dengan adanya pertumbuhan ekonomi negara dan pemerataan ekonomi skala nasional tidak lagi memiliki kendali di pulau jawa pada umumnya yang meninggalkan kesenjangan antar wilayah di jawa dan luar jawa. Maka kebijakan pemerintah ini diharapkan mampu menjawab kondisi yang sering menjadi permasalahan skala nasional. Secara nasional kesenjangan ekonomi yang terjadi Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 59 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa sebesar 5,52 persen. Di Sumatera, kontribusi ekonominya sebesar 21,31 persen. Adapun di Kalimantan, kontribusi ekonominya sebesar 8,05 persen dengan pertumbuhan ekonomi 4,99 persen. Di Sumatera, kontribusi ekonominya sebesar 21,31 persen. Adapun Kalimantan kontribusi ekonominya sebesar 8,05 persen dengan pertumbuhan ekonomi 4,99 persen, dan di Sulawesi kontribusinya 6,33 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,65 persen di ikuti Bali dan Nusa Tenggara kontribusinya sebesar 3,06 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7 persen dan di Maluku dan Papua berkontribusi sebesar 2,24 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,40 persen. sehingga Langkah-langkah pemerintah tersebut di ikuti

dengan design policy yang tepat dalam rangka memberikan solusi bagi kondisi ekonomi dan kemudian dengan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan timur ini juga dapat memberikan kemudahan bagi pulau-pulau di luar ibu kota negara baru yang meminimalkan rentang kendali antar-wilayah karena posisi strategis Kalimantan sebagai pulau yang berada di tengah gugusan kepulauan Indonesia maka perhatian pemerintah untuk memanfaatkan Kalimantan dalam rangka memberikan kemudahan dalam hal satu kesatuan atau integrated memanimialisasi kendali. Sebab rentang kendali antar-wilayah juga merupakan bagian yang penting dalam proses menetapkan ibukota negara di Kalimantan timur tersebut. Sehingga pembangunan infrastruktur yang memadai juga perlu digenjoti agar pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara dapat terukur dengan pasti. Pembangunan infrastruktur dasar penting dilakukan agar terciptanya kebutuhan akan fasilitas dasar bagi masyarakat dapat dirasakan. Terpenting lagi, pemerataan yang diharapkan optimal di ikuti oleh pembangunan sumberdaya manusia di pulau Kalimantan, sehingga pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik dengan tidak meninggalkan masyarakatnya dengan pengelolaan masyarakat yang mampu menjadi penopang dalam perekonomian.

Penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu kota Negara baru merupakan wewenang oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di Jakarta, pemerintah memandang penting untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan tentu saja kebijakan pemerintah ini telah mempertimbangkan berbagai aspek baik itu ekonomi, sosial, infrastruktur, serta keberlanjutan hajat hidup orang banyak merupakan langkah tepat dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan upaya menyejahterakan masyarakat, kebijakan pemerintah yang berdampak publik ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Thomas R. Dye dalam “Understanding Public Policy” 1987, apa yang diinginkan dan apa yang tidak oleh pemerintah, secara teoritis kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan dilakukan dan memberikan manfaat bagi kehidupan bersama, pertimbangan kebijakan secara keseluruhan yang memberikan mafaat untuk masyarakat Kalimantan dan Indonesia oleh pemerintah (Thomas Dye, dalam Awan Y. Abdullah, Yudi Rusfian, 2016). percepatan pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi dan kebijakan pembangunan manusia merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan.

Pertumbuhan dan pembangunan Ekonomi Todaro, 1998 dalam (Ekonomika et al., 2019), mengatakan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiganya adalah:

1. Akumulasi Modal Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Akumulasi modal akan menambah sumber daya baru (contohnya, pembukaan tanah-tanah yang semula tidak digunakan) atau meningkatkan kualitas sumber daya yang sudah ada (misalnya perbaikan sistem irigasi, pengadaan pupuk, pestisida). Hal penting yang harus dipahami adalah, bahwasanya untuk mencapai maksud investasi tersebut selalu dituntut adanya pertukaran antara konsumsi sekarang dan konsumsi mendatang. Artinya, pelaku investasi harus mengurangi konsumsi yang sekarang demi mendapatkan konsumsi yang akan datang itu menjadi lebih baik dari sebelumnya.
2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan jumlah tenaga kerja berarti akan menambah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya akan lebih besar pula.
3. Kemajuan Teknologi Pengertian dari kemajuan teknologi sendiri yaitu dimana cara-cara lama yang sudah digantikan dengan cara yang lebih modern, seperti kegiatan membuat pakaian sudah tidak banyak memakai cara yang manual melainkan menggunakan cara mesin yang sudah diprogram sedemikian rupa, contoh yang lain seperti membangun rumah dan menanam jagung. Kemajuan teknologi diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu (1) kemajuan teknologi yang bersifat netral, (2) kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja dan (3) kemajuan teknologi yang hemat modal. Sedangkan menurut Solow dalam Mankiw (2007: 184-186) berpendapat dalam proses produksi diperlukan kerjasama antar faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang dimaksud meliputi: pertumbuhan angkatan kerja, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan modal. Secara fungsional pernyataan tersebut dapat ditulis:

$$Y = f(K,L) \quad (1)$$

dimana: Y adalah produksi; K adalah modal (Kapital); dan L adalah angkatan kerja (Labor) dalam

teorinya tidak memasukkan factor teknologi solow beranggapan bahwa teknolgi bersifat eksogen. Dan asumsi yang dipakai merupakan metode return to scale yang berarti setiap input dalam produksi akan menghasilkan output yang sama.

Menurut (Lincoln, 1999) Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Artinya pemerintah dalam proses pembangunan harus menjalin Kerjasama dengan pihak eksternal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Sebab menurut (Lincoln, 1999). Pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam per kapita, karena kenaikan ini merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam praktek, lajunya pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto. Apabila tingkat Poduk Domestik Bruto sama dengan atau lebih rendah daripada tingkat pertambahan penduduk, maka pendapatan per kapita akan tetap sama atau menurun. Segala kebijakan pemerintah mestinya bermuara kepada kesejahteraan masyarakatnya Menurut UN-Habitat (2012), dalam (Rahayu, 2020), kota yang sejahtera dikonseptualisasikan sebagai “The Wheel of Urban Prosperity”, yang menganalogikan suatu kesejahteraan sebagai sebuah roda yang terdiri atas lima komponen, yang mana kesejahteraan ini akan tercapai jika roda terus berputar dengan adanya keseimbangan antara kelima komponen sumbu penopangnya atau dengan kata lain suatu kota dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi lima aspek bagi penduduknya. Kelima aspek tersebut meliputi:

1. Productivity:

Kota yang sejahtera harus mampu memfasilitasi terwujudnya produktivitas perkotaan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi perkotaan;

2. Infrastructure:

Kota yang sejahtera harus memastikan ketersediaan infrastruktur beserta sarananya bagi seluruh penduduk, baik infrastruktur transportasi, air bersih, air limbah, drainase, maupun listrik dan telekomunikasi.

3. Quality of life:

Kota yang sejahtera harus mampu memberikan kehidupan berkualitas bagi penduduknya, menyediakan layanan sosial untuk meningkatkan standar kehidupan dan menjamin keselamatan dan keamanan, seperti tersedianya sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan sebagainya.

4. Equity and social inclusion:

Kota yang sejahtera harus mampu menjamin tidak adanya disparitas/ ketimpangan antar penduduk dan senantiasa mengikut sertakan seluruh penduduk tanpa ada yang termarginalkan.

5. Environmental sustainability:

Kota yang mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan kualitas lingkungan. Salah satu analisis yang dapat dalam melihat pertumbuhan suatu wilayah adalah dengan analisis Location Quation (LQ).

Analisis Location Quotient (LQ) adalah perbandingan peran sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor/industri tersebut secara nasional (Tarigan, 2014: 82). Sektor/industri yang diperbandingkan di daerah harus sama dengan sektor/industri secara nasional dan waktu perbandingan juga harus sama. Misalnya: kita membandingkan sector pertanian di tahun 2021 di Kalimantan Timur yang harus dibandingkan dengan sector yang sama pada tingkat nasional. Karena dalam analisis Location Quation kita membandingkan wilayah atau daerah kecil dengan daerah yang lebih besar.

Sedangkan Menurut Widodo (2006) dalam (Ekonomika et al., 2019), logika dasar LQ adalah teori basis ekonomi yang intinya adalah karena industri basis menghasilkan barang- barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Selanjutnya, adanya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi (consumption, C) dan investasi (investment, I) di daerah tersebut. Hal terebut selanjutnya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap industri basis, tetapi juga menaikkan permintaan akan industri non basis (lokal). Kenaikan permintaan (demand) ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan dan juga industri lain. (Tarigan,) dalam (Adi, 2017). Berikut adalah Formula Location Quotient (LQ)

$$\frac{VA_i / PDRB_r}{VA_{i,N} / PDB}$$

LQ_i □

Keterangan :

VA adalah Nilai Tambah; PDRB adalah Product Domestic Regional Bruto; PDB adalah Product Domestic Bruto; i adalah Sektor/industri; r adalah Daerah dan N adalah Nasional (wilayah yang lebih tinggi).

a). $LQ > 1$, artinya peranan sektor tersebut lebih besar di daerah daripada nasional. b). $LQ < 1$, artinya peranan sektor tersebut lebih kecil di daerah daripada nasional.

c). $LQ = 1$, artinya peranan sektor tersebut sama baik di daerah ataupun secara nasional.

Menurut Widodo (2006) teknik LQ mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau sektor sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Teknik LQ dapat dibedakan menjadi dua yaitu LQ statis (static Location Quotient, SLQ) dan LQ dinamis (Dynamic Location Quotient, DLQ), teknik LQ ini membantu untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat suatu sektor. Dalam metode ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi dua golongan yaitu: a. Kegiatan sektor yang melayani pasar di daerah sendiri maupun di luar daerah. Sektor ini dinamakan sektor basis b. Kegiatan sektor yang melayani pasar di daerah sendiri. Sektor ini dinamakan sektor non basis atau sektor lokal. Kelemahan dari metode LQ adalah bahwa kriteria ini bersifat statis karena hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu. Artinya bahwa sektor basis (unggulan) tahun ini belum tentu akan menjadi unggulan pada masa yang akan datang, sebaliknya sektor yang belum menjadi basis pada saat ini mungkin akan unggul pada masa yang akan datang.

Untuk mengatasi kelemahan LQ sehingga dapat diketahui reposisi atau perubahan sektoral digunakan analisis varians dari LQ yang disebut DLQ (Dinamic Location Quotient) yaitu dengan mengintroduksi laju pertumbuhan dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral ataupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan pertahun sendiri sendiri selama kurun waktu tahun awal dan tahun berakhir (Sambodo 2002). Prinsip DLQ sebenarnya masih sama dengan LQ, hanya untuk mengintroduksi laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan sendiri-sendiri selama kurun waktu antara tahun (0) dan tahun (t). Notasi g_i dan G_i digunakan untuk menyatakan laju pertumbuhan sektor i di daerah n dan nasional. Maka persamaan DLQ yang terbentuk adalah :

$$DLQ = \frac{(1+g_i)/(1+G_i)}{(1+g_j)/(1+G_j)}$$

DLQ sebenarnya masih sama dengan LQ, kecuali perbandingan ini lebih menekankan pada laju pertumbuhan. Jika $DLQ = 1$, berarti laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah n sebanding dengan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDB nasional. Jika $DLQ < 1$, artinya proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah n lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDB nasional. Sebaliknya, jika $DLQ > 1$, berarti proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah n lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDB nasional. Pada masa depan, kalau keadaan masih tetap sebagaimana adanya saat ini, maka dapat diharapkan bahwa sektor ini unggul pada masa mendatang

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode analisis LQ dengan menghitung sector pertumbuhan Kalimantan Timur dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto dengan membandingkan laju pertumbuhan sector-sector lapangan usaha atas dasar harga konstan (ADHK) pada Propinsi Kalimantan Timur dengan membandingkannya dengan Produk Nasional Bruto Nasional pada tahun 2018 hingga tahun 2021, guna mendapatkan sector unggulan juga menjadi proyeksi untuk sector potensi yang mestinya didukung oleh kebijakan – kebijakan pemerintah agar memberikan perhatian kepada sector- sector unggul maupun sector yang berpotensi mampu meyejahterakan rakyat. Dalam penelitian

ini juga menggunakan metode Kuantitatif-kuantitatif, artinya menggunakan metode gabungan agar melihat sejauhmana sector unggulan yang mampu menjadi prioritas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, namun juga pandangan-pandangan atau data yang bersifat kualitatif yang digunakan agar menjadi proyeksi pembangunan Ibu Kota Negara baru kedepan yang menggunakan studi kepustakaan maupun penelitian dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Location Quotient (LQ)

Data Produk Domestik Bruto Indonesia dan Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur yang diambil dari Badan Pusat Statistik kemudian dianalisis untuk mendapatkan nilai LQ setiap sektor tahun 2019, 2020 dan 2021. Hasil analisis penulis sajikan pada :

Table. 1 Location Quotient (LQ) Kalimantan Timur tahun 2019, 2020, dan Tahun 2021

Lapangan Usaha	2019	Nasional 2019	LQ	2020	Nasional 2020	LQ	2021*) fix	Nasional 2021	LQ
A	33,355,188.90	2,012,742.80	1,058.53	33,048,688.94	1,378,331.40	0.54	32,963,902.05	1403710	0.52
B	233,680,623.64	1,149,913.50	6.61	222,920,728.32	790,475.20	6.40	227,952,677.54	822099.5	6.11
C	96,802,393.71	3,119,593.80	1.01	94,031,227.95	2,209,920.30	0.97	96,180,242.84	2284821.7	0.93
D	284,711.33	185,115.30	0.05	317,362.53	108,826.40	0.07	324,785.35	114861.1	0.06
E	235,440.05	10,736.10	0.71	247,872.01	9,449.30	0.60	258,257.17	9919.2	0.57
F	35,911,993.09	1,701,741.20	0.69	35,388,716.30	1,072,334.80	0.75	36,949,557.14	1102517.7	0.74
G	26,915,570.41	2,060,268.90	0.43	27,196,566.86	1,385,747.40	0.45	28,222,666.20	1450226.3	0.43
H	14,216,472.05	881,505.40	0.52	13,373,270.52	393,437.90	0.77	13,684,586.51	406187.6	0.74
I	4,340,117.91	440,207.70	0.32	4,108,417.69	299,122.40	0.31	4,184,891.75	310754.7	0.30
J	7,752,537.41	626,532.60	0.40	8,338,484.57	652,062.90	0.29	9,002,576.49	696460.4	0.28
K	6,966,068.05	671,433.80	0.34	7,137,890.70	457,482.90	0.35	7,320,020.65	464638.6	0.35
L	4,291,689.94	439,455.90	0.32	4,321,113.10	324,259.40	0.30	4,290,183.43	333282.9	0.28
M,N	918,425.78	304,285.50	0.10	889,670.71	195,671.10	0.10	911,553.24	197106.7	0.10
O	8,267,790.65	571,584.10	0.47	7,951,298.18	365,439.30	0.49	8,108,528.36	364233.4	0.49
P	7,036,310.43	522,354.20	0.44	7,244,719.93	350,264.60	0.47	7,420,373.00	350655.3	0.47
Q	2,831,486.36	174,689.00	0.53	3,404,051.18	142,228.40	0.54	3,858,131.91	157104.7	0.54
R,S,T,U	2,716,362.51	309,002.00	0.29	2,634,737.17	196,608.70	0.30	2,664,412.20	200772.9	0.29
<u>PDRB</u>	<u>486,523,182.21</u>	<u>15,832,657.20</u>	<u>1.00</u>	<u>472,554,816.66</u>	<u>10,723,054.80</u>	<u>1.00</u>	<u>484,297,345.82</u>	<u>10,669,352.70</u>	<u>1.00</u>

Sumber: www.Badan Pusat Statistik.go.id, diolah.

Dari Tabel diatas tersebut kita ketahui bahwa tahun 2019, LQ > 1 terdapat tiga sector yaitu sector pertanian, kehutanan dan perikanan, sector pertambangan dan penggalian serta sector industri pengolahan. Pada tahun 2020 dan 2021 LQ > 1, hanya ada satu sector yaitu sector pertambangan dan penggalian. Pada sector-sektor ini merupakan sector yang disebut dengan sector basis, atau sector komoditas utama di Propinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2020 dan tahun 2021 LQ < 1, ada enam belas sector, enam belas sector yaitu: sector- sector A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan; C. Industri Pengolahan D Pengadaan Listrik dan Gas; F. Kontruksi; G. Perdagangan besar dan eceran. H. Transportasi dan Perdagangan; I. Penyediaan akomodasi dan Makan minum J. informasi dan komuniaksi K. Jasa Keuangan dan Asuransi; L. Real Estate; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa Lainnya. Sektor-sektor ini disebut sector non-basis (non- base sector) atau sector non-

komoditas. Catatan lain tentang nilai LQ untuk tahun 2020 adalah sektor yang akan menjadi mandiri adalah Industri Pengolahan dengan skor 0,97 dan 0,93 di tahun 2021. yang artinya di tahun 2021 cenderung menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2019. Sektor yang paling kecil adalah sektor Pengadaan listrik dan Gas dengan LQ = 0,7 Pada tahun 2021 yang cenderung mengalami penurunan. Dapat kita lihat bahwa sector pertambangan dan penggalian merupakan sector unggulan di Propinsi Kalimantan Timur yang terus memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di regional Kalimantan dan Indonesia.

Static Location Quotient (SLQ)

Berdasarkan analisis Static location quotient (SLQ), jika nilai $SLQ > 1$ maka sektor tersebut potensial, yakni dapat melayani pasar baik di dalam maupun di luar Propinsi Kalimantan Timur. Semakin nilai SLQ lebih tinggi dari satu, semakin tinggi keunggulan komparatifnya. Sebaliknya jika nilai $SLQ < 1$, maka sektor tersebut bukan potensial di mana belum mampu memenuhi permintaan pasar di Propinsi. Jika nilai $SLQ = 1$, sektor tersebut hanya mampu melayani pasar Kalimantan Timur saja tanpa mampu memasarkan hasil sektor tersebut ke daerah. Berikut adalah Tabel 2 yang menunjukkan hasil perhitungan Location Quotient (SLQ) Propinsi Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021.

Tabel 2. Static Location Quotient (SLQ) Propinsi Kalimantan Timur

Sektor	SLQ Propinsi Kalimantan Timur					Rata-Rata	keterangan
	2017	2018	2019	2020	2021		
A	0.58	0.62	1,058.53	0.54	0.52	212.16	Basis
B	5.91	5.78	6.61	6.40	6.11	6.16	Basis
C	0.90	0.91	1.01	0.97	0.93	0.94	non basis
D	0.04	0.04	0.05	0.07	0.06	0.05	non basis
E	0.64	0.67	0.71	0.60	0.57	0.64	non basis
F	0.73	0.80	0.69	0.75	0.74	0.74	non basis
G	0.40	0.43	0.43	0.45	0.43	0.42	non basis
H	0.64	0.67	0.52	0.77	0.74	0.67	non basis
I	0.31	0.35	0.32	0.31	0.30	0.32	non basis
J	0.32	0.33	0.40	0.29	0.28	0.33	non basis
K	0.35	0.37	0.34	0.35	0.35	0.35	non basis
L	0.30	0.32	0.32	0.30	0.28	0.31	non basis
M,N	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	non basis
O	0.52	0.53	0.47	0.49	0.49	0.50	non basis
P	0.45	0.49	0.44	0.47	0.47	0.46	non basis
Q	0.53	0.58	0.53	0.54	0.54	0.54	non basis
R,S,T,U	0.33	0.35	0.29	0.30	0.29	0.31	non basis
Jumlah	13.07	13.35	1,071.75	13.71	13.20	225.01	

Sumber : Badan Pusat statistic. diolah

Berdasarkan hasil analisis Static Location Quotient pada Tabel 2 diatas tersebut maka hanya ada 2 sektor yang menjadi basis selama lima tahun terakhir yang dominan terhadap pasar. Yaitu sector pertanian, perikanan dan perkebunan dan sector pertambangan yang memiliki nilai diatas satu >1 , dan sector yang lainnya cenderung bukan menjadi basis di Propinsi Kalimantan Timur. Kita tahu bahwa dominsi tambang di beberapa wilayah di propinsi Kalimantan Timur mengakibatkan sector ini menjadi unggulan begitu juga dengan sector pertanian, perikanan, ini merupakan sector dasar dalam kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan. Maka sector ini merupakan sector yang menjadi dominan dalam pertumbuhan, dan menopang pasar di wilayah Kalimantan timur dalam periode tahun 2017 hingga 2021. Berdasarkan perhitungan Static Location Quotient (SLQ).

Analisis Dinamic Location Quotient (DLQ)

Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) Perubahan perekonomian lokal pada kurun waktu tertentu dapat diuji melalui Dynamic Location Quotient (DLQ) sehingga perubahan sektoral dapat diketahui. DLQ merupakan bentuk modifikasi dari SLQ dengan mengakomodasi besarnya PDRB dari nilai produksi sektor atau sub sektor dari waktu ke waktu. Naik turunnya LQ dapat dilihat untuk sektor tertentu pada dimensi waktu yang

berbeda. Nilai DLQ > 1 makapotensi perkembangan sektor i di suatu daerah lebih cepat jika dibanding dengan sektor yang sama dalam lingkup nasional. Sebaliknya, jika DLQ < 1, maka potensi perkembangan sektor i di daerah lebih rendah jika dibanding nasional secara keseluruhan. Tabel 3 Hasil Perhitungan Dynamic Location Quotient (DLQ) Propinsi Kalimantan Timur (2018-2021)

Tabel 3. Data hitung DLQ Propinsi Kalimantan timur

DLQ Propinsi Kalimantan Timur						
	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata	Keterangan
Sektor						
A	0.07	0.07	0.04	0.17	0.09	tidak berpotensi
B	1.03	1.84	1.47	1.02	1.34	Potensi
C	0.97	1.02	1.36	0.98	1.08	Potensi
D	1.41	1.58	3.32	1.26	1.89	Potensi
E	0.7	0.68	0.75	0.79	0.73	tidak berpotensi
F	1.21	1.27	2.11	1.13	1.43	Potensi
G	1.07	1.15	1.71	1.04	1.24	Potensi
H	2.64	2.5	8.79	1.91	3.96	Potensi
I	1.05	1.05	1.52	1.03	1.16	Potensi
J	0.58	0.53	0.5	0.69	0.58	tidak berpotensi
K	0.37	0.34	0.35	0.35	0.35	Tidak berpotensi
L	0.91	0.86	1.23	0.94	0.99	tidak berpotensi
M,N	1.16	1.11	1.91	1.1	1.32	Potensi
O	1.17	1.27	1.94	1.11	1.37	Potensi
P	1.07	1.05	1.77	1.05	1.24	Potensi
Q	76	0.74	1.07	0.84	19.66	Potensi
R,S,T,U	1.18	1.1	2	1.12	1.35	Potensi
Jumlah	92.59	18.16	31.84	16.53	39.78	

Sumber : Badan Pusat Statistik. diolah

Pada table 3 dapat kita simpulkan bahwa sektor yang memiliki DLQ > 1 yaitu sektor pertambangan dan pengalihan (Rata rata DLQ = 1.34), sector industry pengolahan (Rata-rata DLQ = 1.08), Sektor pengadaan listrik dan gas (Rata-rata DLQ = 1.89) Sektor konstruksi (Rata-Rata DLQ = 1.43) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (Rata-rata DLQ = 1.24), sektor jasa perusahaan (Rata-rata DLQ = 1.32), sector administrasi pemerintahan, pertahana, dan jamina sossial wajib (rat-rata DLQ = 1.37 sektor jasa Pendidikan (rat-rata DLQ = 1.24) sector jasa Kesehatan dan kegiatan sosial (rata-rata DLQ = 19.6) sectorjasa lainnya (rat-rata DLQ = 1.35). maka daroi sector yang berpotensi tersebut memiliki prospektif untuk masa depan, yang nantinya dapat diupayakan agar dapat bertumbuh dan memberikan sumbangsi pada perekonomian di Propinsi Kalimantan Timur, dan juga beberapasektor lainnya yang tidak berpotensi untuk dikembangkan di masa yang akan datang.

CONCLUSION

Pada perhitungan menggunakan Analisis Location Quation pada pembahasan maka kita dapat kita ketahui secara rinci kurun waktu dengan data yang ada menunjukkan seberapa potensi atau tidaknya sector perekonomian di Propinsi Kalimantan Timur, dengan adanya perhitungan ini maka dapat kita kembangkan sector-sector yang memiliki nilai LQ > 1. ataupun proyeksi tentang potensi sector perekonomian lain yang mampu berkembang dimasa yang akan datang. Tentunya setiap sector mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya tercipta kesejahteraan bagi masyarakat di Propinsi Kalimantan Timur.

Perlunya kebijakan pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat, maka beberapa sector-sector yang memiliki potensi untuk dikembangkan di masa yang akan datang membutuhkan kebijakan dari pemerintah untuk merealisasikannya, begitu juga pengembangan wilayah Ibu kota Negara Baru dengan tidak meninggalkan sector unggul di wilayah Kalimantan. Tentunya penelitian tentang Propinsi Kalimantan Timur ini yang akan dijadikan Ibu Kota Negara masih banyak kekurangan dalam pendataan sehingga adanya perbaikan dan pendalaman dalam melihat potensi unggul perekonomian di wilayah Kalimantan Timur perlu ditelusuri lebih mendalam lagi, sehingga keberadaan Kalimantan Timur sebagai ibukota penyangga Indonesia kedepan dapat terealisasi segala kebijakan pemerintah.

REFERENCES

- Adi, L. (2017). Analisis Lq , Shift Share , Dan Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 2017. *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri*, 2(1), 79– 90.
- Ekonomika, C., Ekonomi, J., & Tutupoho, A. (2019). Analisis Sektor Basis Dan Sektor Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota). *XIII*(1).
- Pribadi, D. S., & Utomo, S. (2021). Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2, 27–42. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.28>
- Rahayu, L. (2020). Korelasi Antara Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Kesejahteraan Penduduk Di Indonesia. *Planners Insight : Urban and Regional Planning Journal*, 3(1), 004–016. <https://doi.org/10.36870/insight.v3i1.188>
- Thomas Dye, dalam Awan Y. Abdullah, Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung : Alfabeta CV, 2016) hal, 1